

ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS PERBUATAN WANPRESTASI DALAM PERKARA GUGATAN SEDERHANA (Studi Kasus Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2022/PN Liw)

Oleh

ULFHA MAHARANI

Pada dasarnya, setiap orang di dunia tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri tanpa bantuan orang lain. Salah satu interaksi manusia dalam bentuk kerjasama melalui perjanjian tertulis dan lisan. Para pihak yang membuat perjanjian akan memiliki hak dan kewajiban yang diatur oleh hukum, sehingga perjanjian merupakan undang-undang bagi yang membuatnya. Dengan demikian, ketika terjadi konflik di dalamnya terdapat konsekuensi hukum dan dapat diselesaikan dengan cara yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Perkara wanprestasi dapat diajukan ke Pengadilan Negeri dalam bentuk gugatan sederhana ataupun gugatan biasa. Oleh karena itu, penelitian ini berjudul “Analisis Yuridis Perbuatan Wanprestasi Dalam Perkara Gugatan Sederhana (Studi Kasus Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2022/PN Liw)” yang bertujuan untuk mempelajari bagaimana Hakim membuat keputusan dalam perkara wanprestasi Nomor 9/Pdt.G.S/2022/PN Liw, kriteria perbuatan wanprestasi dalam perkara gugatan sederhana, dan bagaimana proses penyelesaian sengketa wanprestasi dalam gugatan sederhana agar memberikan perlindungan bagi para pihak.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dan tipe penelitian deskriptif. Sumber data berasal dari studi kepustakaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memecahkan masalahnya. Studi bahas pustaka, wawancara dan observasi langsung di Pengadilan Negeri Liwa serta dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data. Selanjutnya, data yang digunakan dalam penelitian ini diproses melalui tahapan pemeriksaan data, klasifikasi data, dan analisis data.

Hasil penelitian menunjukkan, suatu Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2022/PN Liw yang menjadi pokok permasalahannya adalah karena Para Tergugat ingkar janji atau wanprestasi terhadap isi SPH Nomor : PK1909P9LK/73/76/09/2019 yang telah diperjanjikan dengan Penggugat sehingga, pihak Penggugat dirugikan atas perbuatan Para Tergugat. Karena perkara tersebut telah memenuhi kriteria dalam Gugatan Sederhana maka Hakim harus memeriksa, memutus dan mengadili dengan berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019

Ulfha Maharani

tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Hakim tidak hanya harus memiliki kemampuan intelektual untuk membuat keputusan dalam suatu perkara, tetapi Hakim juga harus memiliki moral dan integritas yang tinggi untuk mencerminkan keadilan, menjamin kepastian hukum, dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Berdasarkan jenis sifatnya putusan hakim terdiri dari putusan declaratoir, konstitutif dan condemnatoir yang mengandung aspek kepastian hukum, aspek keadilan dan aspek kemanfaatan.

Kata Kunci : Perjanjian, Wanprestasi, Gugatan Sederhana

ABSTRACT

JURIDICAL REVIEW OF TORT ACTIONS IN SIMPLE CLAIMS CASES (Case Study Decision Number 9/Pdt.G.S/2022/PN Liw)

By

ULFHA MAHARANI

Basically, every person in the world cannot meet their own living needs without the help of others. One form of human interaction is cooperation through written and verbal agreements. The parties who make an agreement will have rights and obligations regulated by law, so that the agreement is the law for those who make it. Thus, when a conflict occurs, there are legal consequences and it can be resolved in a manner that complies with applicable legal provisions. Default cases can be filed with the District Court in the form of a simple lawsuit or an ordinary lawsuit. Therefore, this research is entitled "Judicial Analysis of Default Acts in Simple Lawsuit Cases (Case Study of Decision Number 9/Pdt.G.S/2022/PN Liw)" which aims to study how Judges make decisions in default cases Number 9/Pdt.G.S /2022/PN Liw, criteria for acts of tort in small claims cases, and what is the process for resolving breaches of contract disputes in small claims to provide protection for the parties.

This research uses normative legal research methods and descriptive research types. The data source comes from library research. This research uses a qualitative approach to solve the problem. Literature study, interviews and direct observation at the Liwa District Court as well as documentation were used to collect data. Next, the data used in this research was processed through the stages of data inspection, data classification, and data analysis.

The results of the research show that Decision Number 9/Pdt.G.S/2022/PN Liw which is the main problem is because the Defendants broke their promises or defaulted on the contents of SPH Number: PK1909P9LK/73/76/09/2019 which had been agreed with the Plaintiff so that, The Plaintiff was harmed by the actions of the Defendants. Because the case has met the criteria in a Simple Lawsuit, the Judge must examine, decide and adjudicate based on Supreme Court Regulation Number 4 of 2019 concerning Amendments to Supreme Court Regulation Number 2 of 2015 concerning Procedures for Settlement of Simple Claims. Judges must not only have the intellectual ability to make decisions in a case, but judges must also have high morals and integrity to reflect justice, guarantee legal

Ulfha Maharani

certainty, and provide benefits to society. Based on the nature of the judge's decision, it consists of declaratory, constitutive and condemnatory decisions which contain aspects of legal certainty, aspects of justice and aspects of benefit.

Keywords: Agreement, Default, Simple Lawsuit